



ARSITEKTUR KEUANGAN NEGARA

**CETAK BIRU DAN MESIN PENGGERAK
PENGELOLAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

BERDASARKAN MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Katalis Reformasi: Mengapa Sistem Baru Diperlukan?

Sistem Usang & Terfragmentasi

- Hukum Hindia Belanda: ICW (Stbl. 1925) & IBW (Stbl. 1927).
- Disharmoni antar-undang-undang.
- Memicu kekacauan administrasi negara.
- Tidak mampu mengakomodasi tata negara modern.

Reformasi & Amandemen UUD 1945

Sistem Modern & Terpadu

- Mengacu pada Amandemen UUD 1945 (Pasal 23).
- Menciptakan satu *umbrella act* (payung hukum) universal.
- Mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (*sustainable*).

SISTEM KEUANGAN NEGARA



Landasan Filosofis

Pancasila & UUD 1945 (Alinea IV)
Keuangan negara dieksploitasi dan dibelanjakan demi satu tujuan akhir: memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa.



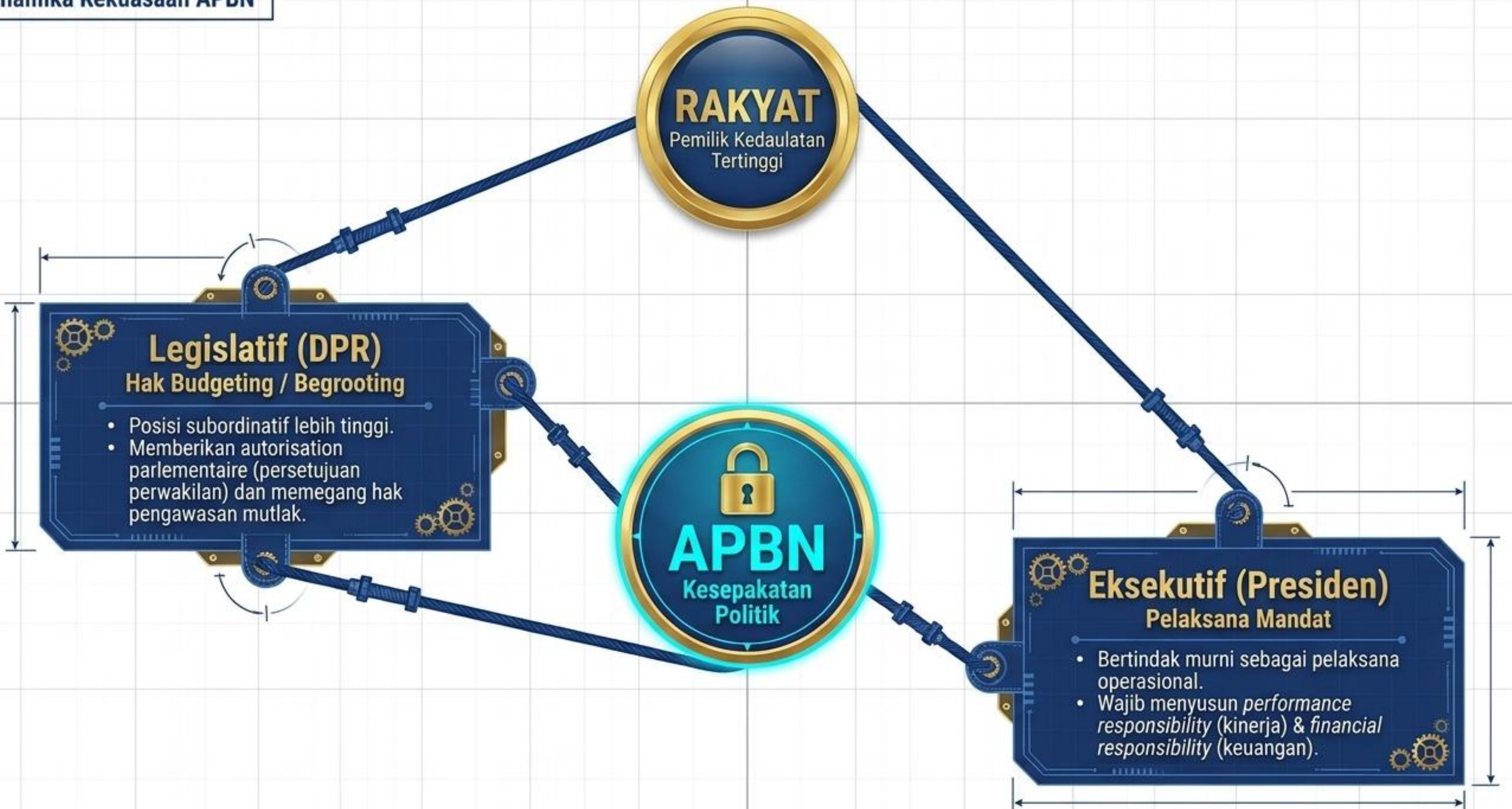
Landasan Yuridis

Pasal 23 UUD 1945.
Mengamanatkan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dilaksanakan secara terbuka, dan diaudit oleh BPK.



Landasan Sosiologis

Motor Penggerak Negara
Keuangan negara adalah urat nadi pemerintahan. Pengelolaan tertib mencegah krisis akibat penyimpangan dan inefisiensi.



Anterioritas (Prealable)

APBN mutlak harus disetujui oleh DPR sebelum dapat dieksekusi oleh pemerintah.

Annualitas

Berlaku tegas untuk periode 1 tahun (*single period*). Tidak diakumulasi ke tahun berikutnya.

Unitas

Seluruh anggaran dirangkum utuh dalam satu dokumen tunggal yang komprehensif.

Spesialitas

Alokasi dana bersifat *specified* (sangat rinci) dan dilarang digeser tanpa prosedur hukum.

5 Prinsip Emas Eksekusi Anggaran

Golden Principles of Budget Execution

Universalitas

Seluruh penerimaan dan pengeluaran wajib masuk dan keluar hanya melalui satu pintu: Kas Negara.

Paket Undang-Undang Keuangan Negara (The Umbrella Acts)

UU No. 17 Tahun 2003

Keuangan Negara

Dimensi
Politis (Makro)

Fokus Utama
Legislatif (DPR) vs
Eksekutif (Presiden)

Fungsi Fundamental
Perencanaan, penyusunan,
dan penetapan APBN sebagai
wujud kesepakatan politik
tertinggi.

UU No. 1 Tahun 2004

Perbendaharaan Negara

Dimensi
Administratif (Mikro)

Fokus Utama
Hubungan antar-instansi
internal Eksekutif

Fungsi Fundamental
Operasionalisasi eksekusi
APBN, pengelolaan kas negara,
dan pedoman tindakan
pejabat publik.

UU No. 15 Tahun 2004

Pemeriksaan

Dimensi
Akuntabilitas (Audit)

Fokus Utama
BPK (Independen) vs
Pemerintah

Fungsi Fundamental
Memeriksa secara independen
pengelolaan keuangan negara
untuk dilaporkan kembali
kepada DPR.



4. Pertanggungjawaban Akhir

Hasil audit dilaporkan kembali ke DPR untuk memastikan muara akhir pada Kesejahteraan Umum.



1. Kedaulatan & Persetujuan

Rakyat melalui DPR memberikan persetujuan politik (UU 17/2003).



3. Pengawasan Independen

BPK mengaudit seluruh eksekusi secara bebas dari pengaruh pemerintah (UU 15/2004).



2. Operasionalisasi & Eksekusi

Pemerintah memungut pendapatan & mengeksekusi belanja murni melalui Kas Negara (UU 1/2004).

Siklus Akuntabilitas Berkelanjutan

Keuangan negara bukan sekadar pencatatan administratif, melainkan siklus akuntabilitas politik berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat.